

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang kehidupannya manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan belajar. Belajar mempunyai bentuk dan jenis yang sangat beragam, mengambil ruang di berbagai tempat baik dalam bentuk format pendidikan formal maupun informal, dengan tingkat kompleksitas yang berbeda mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih.

Para ahli mencoba menggolongkan jenis-jenis belajar ke dalam kategori-kategori. Bloom (1971) membaginya dalam katagori domain atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing dibagi-bagi lagi ke dalam tingkatan yang bersifat hierarkis. Gagne membagi jenis belajar menjadi lima kategori yakni belajar kecakapan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, belajar sikap, dan belajar kecakapan (ketrampilan) motorik.

Kalau Bloom membuat klasifikasi terutama untuk menyusun rancangan alat evaluasi maka Gagne menyusunnya terutama untuk memudahkan merancang kondisi-kondisi yang sesuai dengan sifat belajar sehingga proses belajar dapat efektif. Konsep belajar yang mutakhir dibuat oleh Komisi Delors dari Unesco yang membagi belajar dalam empat kategori yang disebut pilar. Keempat pilar tersebut adalah: (1) belajar bagaimana belajar (*learning to know*), (2) belajar berbuat (*learning to do*), (3) belajar hidup bersama secara harmonis (*learning to live together*), dan (4) belajar mengaktualisasikan diri (*learning to be*), (UNESCO-APNIEVE, 1997).

Belajar juga dikaitkan dengan konsep kompetensi yang berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk berbagai pekerjaan dan profesi, diperlukan kompetensi yang sifatnya generik yang melintas batas disiplin ilmu namun ada pula kompetensi khusus sesuai dengan sifat khusus bidang studi atau pekerjaan masing-masing.

Adalah tidak mudah menetapkan standar kompetensi, terlebih lagi untuk pekerjaan yang hasilnya tidak segera terlihat dan sifatnya sangat kompleks. Kompetensi merupakan usaha gabungan dari berbagai energi dan potensi yang ada pada seseorang.

Belajar juga sering dihubungkan dengan tugas perkembangan seseorang, yakni kecakapan yang diharapkan oleh lingkungan sosial untuk dapat dikuasai dan dilaksanakan oleh individu pada tahap perkembangan tertentu.

Dewasa ini dunia pendidikan di Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan mutu pendidikan berkualitas dengan melahirkan tamatan yang berkompetensi dan mampu bersaing sehat di ajang pasar kerja global. Diperlukan kerja keras dan ketekunan para pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional untuk menggali dan mengakomodir pendidikan yang bermutu dan life-skills kepada anak didik. Pemerintah sebagai pemegang otoritas mencerdaskan kehidupan bangsa harus berperan pro-aktif bersama masyarakat menciptakan iklim yang kondusif dan terbuka agar kemajuan pendidikan bisa terkendali dan terukur.

Pengendalian mutu pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dievaluasi dan terus ditingkatkan pemerintah baik dari pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Kendali mutu inilah yang akan mengantarkan putra-putri bangsa menjadi manusia yang cerdas lahir dan batin serta bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa dan negara

ke depan. Prioritas kendali mutu merupakan cerminan keseriusan pemerintah dalam khususnya dalam dunia pendidikan.

Disamping itu, diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam keterlibatannya terhadap pengendalian mutu proses pembelajaran sehingga menciptakan mutu hasil belajar seperti yang kita harapkan. Diupayakan semua pihak yang terlibat dalam pengendalian mutu pendidikan bersungguh-sungguh dalam bekerja, punya kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam pencapaian mutu pendidikan tamatan yang berdayaguna dan berhasilguna.

Keseriusan pemerintah dalam hal pendidikan dapat dilihat dari mutu tamatan yang semakin hari semakin baik, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang professional serta anggaran pendidikan yang terus menerus meningkat setiap tahun. Selanjutnya, sekolah diberi kesempatan untuk meningkatkan kategorinya dari Sekolah Mandiri, Sekolah Standar Nasional bahkan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional dan akhirnya menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.

Penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah mengategorikan sekolah/madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional ke dalam kategori mandiri. Penjelasan selanjutnya menyebutkan bahwa sekolah kategori mandiri (SKM) harus menerapkan sistem kredit semester (SKS). SKS adalah salah satu sistem penerapan program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subyek. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Peserta didik diberi kebebasan untuk merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan, dan harapan masing-masing.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Mengacu pada konsep tersebut, SKS dapat diterapkan untuk menunjang realisasi konsep belajar tuntas yang digunakan dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada Sistem Kredit Semester, setiap satu satuan kredit semester (1 SKS) berbobot dua jam kegiatan pembelajaran per minggu selama 16 minggu per semester. Pada SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, satu jam kegiatan tatap muka berlangsung selama 45 menit, sedangkan 25 menit kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan mandiri. Dengan demikian, penerapan SKS pada KTSP perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas di mana satuan kegiatan belajar peserta didik tidak diukur berdasarkan lama waktu kegiatan per minggu-semester tetapi pada satuan (unit) kompetensi yang dicapai.

Berdasarkan penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2) bahwa ciri Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah terpenuhinya standar nasional pendidikan dan mampu menjalankan sistem kredit semester. Dari ciri tersebut Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional memiliki profil sebagai persyaratan minimal yang meliputi :

1. Dukungan internal:

- a. Kinerja Sekolah indikator terakreditasi A, rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00, persentase kelulusan UN ≥ 90 % untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir > daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang diraih, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa per kelas

maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru, ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua.

- b. Kurikulum, dengan indikator memiliki kurikulum Sekolah Kategori Mandiri, beban studi dinyatakan dengan satuan kredit semester, mata pelajaran yang ditawarkan ada yang wajib dan pilihan, panduan/dokumen penyelenggaraan, memiliki pedoman pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menajagi potensi peserta didik dan memiliki pedoman penilaian.
- c. Kesiapan sekolah, dengan indikator Sekolah menyatakan bersedia melaksanakan Sistem Kredit Semester, Persentase guru yang menyatakan ingin melaksanakan $SKS \geq 90\%$, Pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, Kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer.
- d. Sumber Daya Manusia, dengan indikator persentase guru memenuhi kualifikasi akademik $\geq 75\%$, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90 %), rasio guru dan siswa, jumlah tenaga administrasi akademik memadai, tersedia guru bimbingan konseling/ karir. (e) Fasilitas di sekolah, dengan indikator memiliki ruang kepala Sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang Unit Kesehatan, tempat Olah Raga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium: Bahasa, Teknologi informasi/komputer, Fisika, Kimia, Biologi, Multimedia, IPS, Perpustakaan yang memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran, memberikan layanan bimbingan karir.

2. Dukungan eksternal

Untuk menyelenggarakan SKM/SSN berasal dari dukungan komite sekolah, orang tua peserta didik, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dukungan dari tenaga pendamping pelaksanaan SKS. Sejak tanggal 8 Juli 2003 bangsa Indonesia tercinta ini berniat memperbaiki kegiatan pendidikan secara mendasar karena telah diundangkan sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam naskah Undang-undang Negara RI nomor 20 tahun 2003 Pasal 35 dituliskan “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan

nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang mengatur Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM ini jauh lebih mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas ini sejak dini merupakan kata kunci yang sangat penting untuk dipikirkan dan diaplikasikan dalam tahap implementasi secara sungguh-sungguh, sistematis dan profesional.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pengembangan SDM, pendidik dalam hal ini guru sebagai salah satu unsur yang berperan penting didalamnya, memiliki tanggungjawab yang besar sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan dan mampu mengatasi serta memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak didik yang berkembang dan menjadi isu sentral dewasa ini. Guru merupakan komponen yang sangat menentukan baik buruknya mutu pendidikan.

Guru berkaitan erat dengan keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas sebagai unsur mikro dari keberhasilan pendidikan. Tentu saja keberhasilan proses pengajaran tidak terlepas dari kepiawaian guru dalam menerapkan metoda, teknik dan strategi pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini dituntut kreatifitas guru dalam proses pembelajaran yang aplikatif dan mampu menyesuaikan dengan aktifitas sehari-hari, sehingga anak didik merasa bahwa apa yang diajarkan di sekolah merupakan isu faktual dalam kehidupan nyata.

Menggagas persoalan pendidikan pada dasarnya adalah menggagas persoalan kebudayaan dan peradaban. Secara spesifik gagasan pendidikan akan merambah ke wilayah pembentukan peradaban masa depan, suatu upaya merekonstruksi pengalaman-pengalaman peradaban umat manusia secara berkelanjutan guna memenuhi tugas kehidupannya, generasi demi generasi. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan, nilai dan sikap yang diberikan secara lengkap kepada generasi muda. Hal ini dilakukan untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya.

Dalam keseluruhan proses pendidikan khususnya pendidikan di sekolah, guru memegang peranan yang paling utama. Perilaku guru dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh dan warna yang kuat bagi pembinaan perilaku dan kepribadian siswa. Dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (UUSPN, 2003:3).

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional ini sangat jelas peranan guru sangat esensial dan vital. Sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar (PBM), guru memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dalam merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran (Syafuruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, 2002:7). Guru juga memiliki kedudukan sebagai figur sentral dalam meningkatkan proses belajar mengajar (Tabrani Rusyan, dkk, 1994:3). Di tangan para gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah, serta di tangan mereka pulalah bergantungnya masa depan karir peserta didik yang menjadi tumpuan para orangtua. Maka diharapkan melalui proses ini peserta didik mempunyai sejumlah kepandaian dan kecakapan tentang sesuatu yang dapat membentuk kematangan pribadinya.

Namun, apabila kita melihat realitas yang terjadi ternyata kualitas guru pada saat ini masih banyak dibicarakan orang, atau masih saja dipertanyakan, baik di kalangan para pakar pendidikan maupun di luar pakar pendidikan. Selama dasawarsa terakhir ini hampir setiap hari, media massa cetak baik harian maupun mingguan memuat berita tentang guru. Ironisnya, berita-berita tersebut banyak yang cenderung melecehkan posisi guru, baik yang sifatnya menyangkut kepentingan umum sampai kepada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, sedangkan dari pihak guru sendiri nyaris tidak mampu membela diri. Masyarakat kadang-kadang mencemoohkan dan menuding guru tidak berkompeten, tidak berkualitas dan sebagainya, manakala putra-putrinya tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ia hadapi sendiri atau memiliki kemampuan tidak sesuai dengan harapannya (Usman, M Uzer, 2006:3).

Kalangan bisnis (industri) pun memprotes para guru karena kualitas lulusan dianggap kurang memuaskan bagi kepentingan perusahaan mereka. Tentu saja tuduhan dan protes

dari berbagai kalangan tersebut dapat menurunkan citra guru. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut memang bukan tanpa alasan, karena memang ada sebagian oknum guru yang menyimpang dari kode etiknya. Anehnya lagi kesalahan sekecil apa pun yang diperbuat guru mengundang reaksi yang begitu hebat di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya sikap demikian menunjukkan bahwa memang guru seyogianya menjadi anutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran sebagai faktor penentu keberhasilan tujuan suatu organisasi selain tenaga kependidikan lainnya, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik untuk memberikan bimbingan yang muaranya akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Untuk itu kinerja guru harus selalu ditingkatkan.

Dalam dunia pendidikan kinerja guru atau prestasi kerja (*performance*) merupakan hasil yang dicapai guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam melaksanakan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, masih banyak ditemui perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari mutu proses pembelajaran terutama bahasa Inggris, kurang variatif, kecenderungan pada metoda lama dan tanpa memperhatikan tingkat

pemahaman anak didik terhadap materi yang diajarkan. Anak didik kurang pro-aktif dan kritis dalam menerima informasi dalam proses belajar mengajar, lebih banyak menulis dan mendengarkan, menganggap bahwa materi pengajaran tersebut sebagai bahan hafalan sehingga tidak memahami konsep yang sebenarnya. Sejauh ini konsep pendidikan masih didominasi oleh pandangan bahwa ilmu pengetahuan hanya sebatas perangkat fakta-fakta yang harus dihafal bukan aplikatif. Kelas masih sangat terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan (Depdiknas, 2000).

Masalah yang dihadapi di dunia pendidikan dewasa ini merupakan isu lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak didik kurang dirangsang untuk mengembangkan ketrampilan aplikatifnya. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak didik menghafal untuk menghafal informasi. Anak didik terbiasa menghafal informasi untuk diingat dan menimbunnya tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingat tersebut dengan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya anak didik hanya pintar secara teoritis tapi miskin aplikasi. Hal seperti ini sangat terasa terjadi pada proses pembelajaran bahasa Inggris dimana anak didik diajarkan ketatabahasaan yang sangat kental dan kaku, sedangkan praktek berbicara sebagai alat komunikasi dan pengantar ilmu kurang mendapat apresiasi oleh guru. Bahkan banyak guru mengajar bahasa Inggris jarang sekali berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Ini merupakan preseden yang buruk bagi anak didik kita.

Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagai aplikasi dari Kurikulum 2004, menuntut guru mengaitkan pembelajarannya dengan isu-isu nyata yang sedang berkembang saat ini. Belajar akan lebih bermakna jika anak didik mengalami apa yang dialaminya, dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan bahasa yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. KTSP

menghendaki proses pembelajaran berpusat pada siswa (*student centered*), bukan *teacher centered*, guru hanya sebagai *fasilitator*.

Pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris merupakan isu sentris yang diangkat oleh penulis untuk melihat sejauhmana prestasi belajar murid yang diperoleh apakah sudah memenuhi standar berlaku dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).

B. Identifikasi Masalah

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi belajar murid, antara lain berhubungan dengan guru menyangkut kesadaran guru, komitmen guru terhadap mutu, dan keterlibatan guru dalam pengendalian mutu, sarana dan prasarana di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, layanan pengawasan, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis mengidentifikasi permasalahannya berfokus pada guru dengan kesadaran, komitmen, dan keterlibatannya dalam kendali mutu.

C. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa faktor keberhasilan yang mempengaruhi pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris pada SMP SSN dan SMP RSBI adalah pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), kurikulum, proses belajar mengajar, fasilitas, tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen, penilaian, pembiayaan, dan pengembangan aspek-aspek lainnya.

Disamping itu diperlukan pengembangan SDM, yaitu : persyaratan calon siswa baru yang memiliki kompetensi dan kecerdasan tinggi, pengembangan kompetensi guru terus

menerus, pengembangan kompetensi kepala sekolah, pengembangan tenaga pendukung, pengembangan dan pemberdayaan Tim Pengembang SBI.

Persyaratan utama sebagai penyelenggara Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah para guru, kepala sekolah, dan karyawan harus mampu berkomunikasi dalam bahasa asing (bahasa Inggris). Sebagai tambahan, harus menguasai kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum internasional yang dipilih. Pengembangan sumberdaya manusia mutlak harus dilaksanakan:

- a. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris bagi guru-guru semua mata pelajaran;
- b. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris bagi kepala sekolah dan jajarannya;
- c. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris bagi karyawan (tenaga tata usaha, laboran, teknisi dan pustakawan);
- d. Peningkatan kemampuan guru dan karyawan dalam bidang studi atau latar belakang bidangnya masing-masing;
- e. Peningkatan manajerial bagi kepala sekolah dan jajarannya;
- f. Peningkatan kemampuan komputer dan internet bagi semua warga sekolah.

Setelah semua aspek-aspek pendukung suksesnya pelaksanaan dan penyelenggaraan RSBI tersebut, maka kita akan mengkaji dan menilai bagaimana kendali mutu proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu dengan mengacu kepada poin-poin diatas.

D. Batasan Masalah

Terdapat banyak aspek yang mempengaruhi berjalannya proses belajar mengajar di sekolah seperti sarana prasarana, kondisi siswa, tenaga pendidik dan kependidikan dan lain-lain. Namun pada penelitian ini permasalahan difokuskan pada kesadaran guru

terhadap kendali mutu dan komitmen guru terhadap kendali mutu, serta keterlibatan guru dalam pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP SSN dan SMP RSBI apakah telah memenuhi standar proses yang ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana pencapaian hasil belajar anak didik. Ketiga faktor ini dipandang memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar di sekolah dikarenakan ketiga poin tersebut dapat bersinergi untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Disamping pembatasan variabel, ruang lingkup penelitian pun dibatasi di lingkungan SMP SSN dan SMP RSBI kelas IX di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris dilakukan oleh guru berbasis Plan-Do-Check-Action?
2. Bagaimana tingkat kesadaran guru terhadap pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris berbasis PDCA?
3. Bagaimana komitmen guru terhadap pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris berbasis PDCA?
4. Apakah kesadaran dan komitmen guru terhadap mutu berpengaruh terhadap keterlibatan guru dalam pengendalian mutu pendidikan berbasis PDCA?
5. Apakah kesadaran dan komitmen guru terhadap mutu, serta keterlibatan guru dalam pengendalian mutu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa berbasis PDCA?

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup masalah yang dikemukakan diatas timbul pertanyaan bagaimana pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP Sekolah Standar Nasional dan SMP RSBI di Kota Medan berbasis PDCA dalam kerangka

penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Utara dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara. Penelitian terhadap pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP SSN dan RSBI adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Kegiatan yang menjadi fokus penelitian mencakup :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran mutu terhadap keterlibatan guru dalam pengendalian mutu?
2. Bagaimana pengaruh komitmen mutu terhadap keterlibatan guru dalam pengendalian mutu?
3. Bagaimana pengaruh keterlibatan guru dalam pengendalian mutu terhadap prestasi belajar murid?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran mutu terhadap prestasi belajar murid?
5. Bagaimana pengaruh komitmen mutu terhadap prestasi belajar murid?

F. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Secara umum penulis ingin mengetahui seberapa besar pengendalian mutu proses pembelajaran terhadap mutu hasil pembelajaran bahasa Inggris di SMP SSN dan RSBI di Kota Medan.

b. Tujuan khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan model Deming, PDCA. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan untuk mengetahui gambaran tentang :

1. Pengaruh kesadaran mutu terhadap keterlibatan guru dalam kendali mutu.
2. Pengaruh komitmen mutu terhadap keterlibatan guru dalam kendali mutu.

3. Pengaruh keterlibatan guru dalam kendali mutu terhadap prestasi belajar siswa.
4. Pengaruh kesadaran mutu terhadap prestasi belajar murid.
5. Pengaruh komitmen mutu terhadap prestasi belajar murid.

G. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis), penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Penjaminan Mutu Pendidikan SPs UPI dalam hal pengendalian mutu pendidikan. Hal ini dapat dijadikan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian tentang upaya peningkatan pengendalian mutu proses pembelajaran.

b. Manfaat Praktis

Ditinjau dari aspek praktis dari penelitian ini adalah informasi dan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, akan dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan masukan kepada sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan serta sebagai rujukan bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara untuk pendataan pengendalian mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dengan harapan berguna sebagai masukan dalam menyusun strategi pengendalian mutu pendidikan. Bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme, tergugah dan termotivasi tinggi untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya (*teacher's professional development*) dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

H. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan titik pangkal penelitian yang akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun hipotesis penelitian. Pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan berbasis PDCA dapat terukur dan dikelola dengan baik, sehingga mutu hasil pembelajaran akan meningkat sesuai dengan harapan kita semua. Dalam hal ini asumsi yang dipakai menjadi landasan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian mutu proses pembelajaran merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menghasilkan mutu hasil yang lebih baik.
2. Perencanaan yang sistematis dan terpadu akan menghasilkan mutu hasil yang lebih baik.
3. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu kepada perencanaan yang lebih baik akan menghasilkan output yang lebih baik.
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan yang baik akan menghasilkan nilai mutu hasil yang lebih baik.
5. *Feedback* dan *continuous improvement* terhadap apa yang telah dilakukan oleh guru di dalam dan di luar kelas akan menghasilkan mutu hasil yang terus menerus meningkat.
6. Kesadaran dan komitmen guru terhadap mutu, serta keterlibatan guru merupakan suatu keharusan untuk menciptakan budaya mutu pendidikan.
7. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar murid, seperti jenjang dan spesifikasi pendidikan, lama bertugas, jenis kelamin, dan sebagainya.

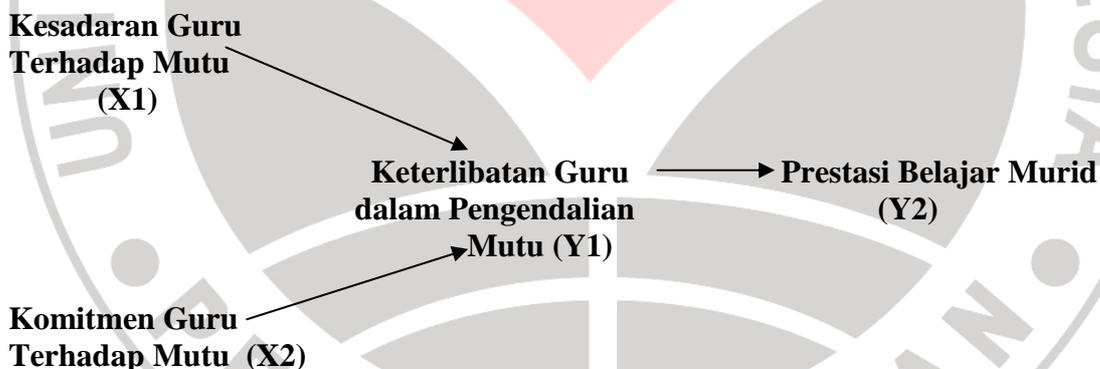
I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Arikunto (2006:71) mendefinisikan hipotesis sebagai, *"Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul"*.

Bertitik tolak dari pendapat diatas, dan berdasarkan fokus masalah yang diteliti, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

" Terdapat kontribusi yang positif dan signifikan pengendalian mutu proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP SSN dan RSBI di Kota Medan terhadap mutu hasil pembelajaran".

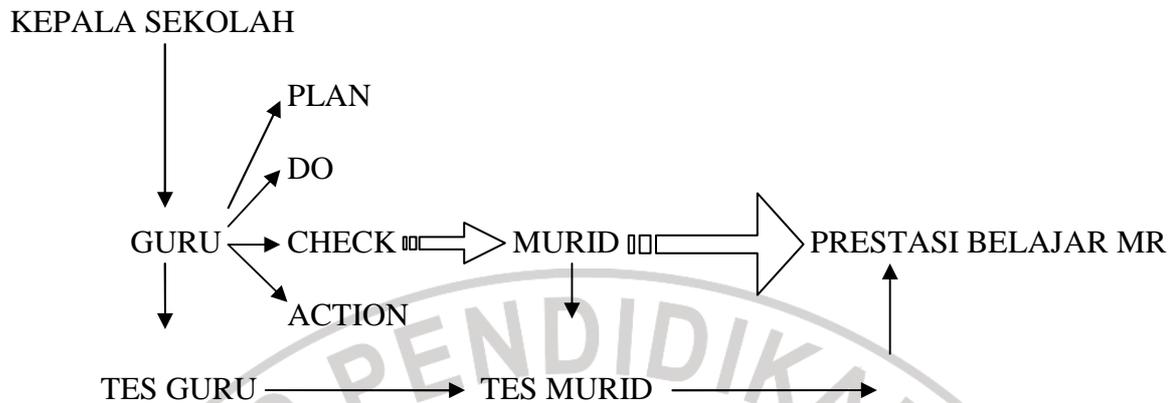
Secara skematik paradigma penelitian dividualisasikan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Skema Hipotesis Penelitian

Berdasarkan skema hipotesis penelitian diatas bahwa mutu prestasi belajar murid (Variabel Y2) ditentukan oleh Pengendalian mutu proses pembelajaran (Variabel X1, X2 dan Y1).

J. Kerangka Berfikir



Gambar 1.2
Alur Kerangka Berpikir

Keberhasilan output atau mutu hasil belajar tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau penilaian dan tindaklanjut (feedback) serta perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk itu diperlukan tindakan yang sinergi oleh guru dan anak didik yang berperan aktif didalam kegiatan belajar mengajar (KBM) baik dari awal hingga akhir proses pembelajaran.

Kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap mutu hasil pembelajaran yang baik oleh guru selalu direspon dan dihargai oleh anak didik, sehingga anak didik menjadi pusat pelaku pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitator dan pengarah untuk terciptanya proses belajar mengajar yang produktif dan bermutu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu proses pembelajaran yang baik tentu akan menghasilkan mutu hasil yang baik pula.

K. Defenisi Operasional

1. Kesadaran Guru terhadap Mutu

Kesadaran adalah suatu keadaan, dimana setiap orang yang mengetahui apa yang ia ketahui. Dari setiap apa-apa yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan

berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan menempuh lapisan-lapisan. Semakin tinggi lapisan kesadaran seseorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan semakin mendasar pula pengetahuan orang itu.

2. Komitmen Guru terhadap Mutu

Komitmen merupakan sikap atau perilaku dan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sampai dengan pencapaian hasil yang sebagaimana diharapkan. Mutu adalah perubahan. Komitmen untuk bermutu berarti komitmen untuk berubah. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar pijakan yang kuat, yaitu:

- a. Komitmen akan perubahan baik kepala sekolah maupun pendidik (pendidik dan tenaga kependidikan).
- b. Pemahaman terhadap kondisi yang ada di sekolah.
- c. Memiliki visi dan misi yang jelas ke depan sebagai pedoman.
- d. Memiliki rencana strategis yang jelas untuk melaksanakan visi dan misi.
- e. Menjalankan prinsip manajemen mutu total (*total quality management*).

3. Keterlibatan Guru dalam Pengendalian Mutu

Keterlibatan guru dalam pengendalian mutu berbasis PDCA sudah sangat jelas digambarkan bagaimana andil guru melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan program tindak lanjut terhadap mutu proses pembelajarannya, sehingga menghasilkan prestasi belajar murid sebagaimana ditargetkan dan diharapkan pencapaiannya.

4. Prestasi Belajar Murid

Prestasi belajar murid adalah hasil akhir atas pencapaian mutu proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Semakin tinggi level kesadaran, komitmen terhadap mutu, dan keterlibatan guru dalam pengendalian mutu diharapkan menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi bagi prestasi murid itu sendiri.

L. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pemecahan masalah secara terstruktur dan sistematis, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan hipotesis penelitian, kerangka berfikir, dan definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan kajian pustaka berupa uraian mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini sebagai dasar pemikiran dan pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang uraian langkah-langkah yang dilakukan selama penelitian dan penulisan tesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi keseluruhan data hasil penelitian dan kuesioner. Memaparkan hasil pengelolaan data berdasarkan metode yang telah ditetapkan serta analisis data yang dilakukan. Hasil analisis ini kemudian dilakukan pembahasan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dan sekolah/organisasi/institusi berdasarkan hasil penelitian.